



Persepsi Peserta Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kepercayaan Publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Novri Sari MP Pasaribu¹ dan Dara Aisyah²

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: novrisari21@gmail.com

How to Cite:

Pasaribu, N. S. M., & Aisyah, D. (2024). Persepsi Peserta Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kepercayaan Publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(2); 132-142. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.9.2.2024.132-142>

Abstract

The Direct Cash Assistance (BLT) program in Indonesia aims to alleviate economic hardship, particularly during the COVID-19 pandemic. It seeks to boost purchasing power and mitigate the crisis's impact. While BLT is seen as a potential solution to poverty and economic instability, its success hinges on public trust. This study analyzes community perceptions and trust in the BLT program in Cinta Damai Village. Using a mixed-methods approach, the research found a positive perception among recipients who acknowledged the benefits of BLT funds. However, concerns persist regarding fairness and transparency in the program's implementation. The study concludes that a positive public perception enhances trust, with 21% of trust variability explained by perception, while other factors remain unexplored.

Keyword: direct cash assistance (BLT); perception; public trust

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin, terutama saat pandemi COVID-19. BLT bertujuan meningkatkan daya beli dan mengurangi dampak krisis ekonomi, serta dianggap dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung stabilitas ekonomi lokal. Keberhasilan BLT sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap proses penyaluran dan pemerintah. Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap BLT dan dampaknya pada kepercayaan publik di Desa Cinta Damai. Metode dalam penelitian ini menggunakan pedekatan campuran (mixed methods). Hasilnya menunjukkan persepsi yang baik bagi penerima BLT, peserta merasa adanya manfaat program. Namun berdasarkan responden bukan peserta program belum merasa adanya keadilan dan transparansi data. Sehingga semakin baik persepsi, semakin baik pula kepercayaan publik. Meski variabel kepercayaan publik dan persepsi hanya menjelaskan 21% yang menggambarkan rendahnya kepercayaan publik, sisanya dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: bantuan langsung tunai (BLT); persepsi; kepercayaan publik

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah global yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan muncul karena berbagai faktor, seperti upah minimum yang rendah, standar hidup yang buruk, dan kurangnya lapangan kerja. Di Indonesia, isu kemiskinan masih menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 (A Anshori, 2021)

Pemerintah telah menerapkan berbagai program bantuan sosial untuk mengurangi dampak kemiskinan, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi COVID-19. BLT Dana Desa disalurkan selama enam bulan, dengan besaran Rp600.000 per bulan untuk tiga bulan pertama dan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi di tingkat desa (Ika Agustina, 2021)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial pemerintah, yang juga mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Program ini diprioritaskan bagi warga miskin yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Dengan adanya BLT Dana Desa, diharapkan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat terendah dapat bergerak dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi instrumen kebijakan sosial yang krusial, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi dampak negatif dari krisis. Namun, efektivitas BLT tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap program tersebut dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang menjalankannya (Himawati, 2021)

Persepsi masyarakat tentang BLT dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran, keadilan dalam distribusi, serta efektivitas bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Persepsi positif masyarakat terhadap BLT dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik, pada gilirannya, merupakan modal sosial yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dan menghadapi tantangan di masa depan.

Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi masyarakat terhadap program BLT dan dampaknya terhadap kepercayaan publik di Desa Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang. Dengan memahami bagaimana masyarakat memandang BLT dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan BLT dan peningkatan kepercayaan publik secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepercayaan publik di luar persepsi terhadap BLT.

Desa Cinta Damai dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang menerima program BLT selama pandemi COVID-19. Dengan populasi yang relatif homogen dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, desa ini memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap BLT dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang dinamika kepercayaan publik dalam konteks program bantuan sosial,

khususnya BLT. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan program bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

2. Teori dan Konsep

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang di rancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Suharto, 2008) (Nugroho, 2009) (Agustino, 2016) (Abdullah Ramdhani, 2017). Tindakan ini melibatkan pilihan-pilihan strategis untuk mengatasi masalah sosial yang telah diakui sebagai masalah publik (Widodo, 2001). Anderson dalam Widodo (2001:190) menjelaskan bahwa komponen penting dalam kebijakan publik adalah memecahkan masalah, adanya kelompok sasaran, koherensi, program intervensi, peran aktor publik, langkah-langkah formal, dan keputusan serta kegiatan. Proses pembuatan kebijakan publik melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi (Winarno, 2016).

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial. Kebijakan ini dibuat untuk merespon isu-isu publik di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan perlindungan anak (Mohammad Yusri, 2021). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial (Midgley, 2000) mengkategorikan kebijakan sosial menjadi tiga bentuk, yaitu peraturan perundangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan.

Menurut Magil dalam Edi Suharto (2014:10), secara umum kebijakan publik lebih luas dibandingkan kebijakan sosial. Namun, kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Persamaan keduanya antara kebijakan publik dan kebijakan sosial dinilai dari kinerja yang merupakan deskripsi terhadap hasil-hasil pengimplementasian produk kebijakan atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan.

Adapun kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya ialah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada dasarnya program tersebut adalah skema bantuan sosial yang dilakukan dengan men-transfer dana tunai secara langsung kepada para peserta program dari kalangan keluarga miskin. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif dari kebijakan ekonomi atau kondisi sosial tertentu (Tioma Roniuli Hariandja, 2020).

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi peserta program terhadap program BLT. Persepsi merupakan proses manusia menerima stimulus melalui alat indera, kemudian mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan informasi tersebut untuk memahami lingkungan sekitarnya (Waligito, 2015). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dari Waligito (2015: 89-90), yaitu adanya objek yang akan dimintai keterangannya tentang pandangan mereka terhadap manfaat BLT dan pemahaman mereka terhadap program BLT dari hasil kuesioner. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi fisiologis, perhatian, minat, pengalaman dan ingatan, serta suasana hati (Firdayanti B Hakima). Sementara itu, faktor eksternal mencakup ukuran dan penempatan objek, warna objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan stimulus, serta gerakan.

Sebagaimana kajian ini bertujuan untuk mengetahui peserta program BLT yang dikaitkan dengan masalah kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Kebijakan publik dan kepercayaan publik saling berhubungan dan mempengaruhi efektivitas kebijakan dan kepentingan masyarakat (Anggara, 2014). Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan sikap atau tindakan yang menunjukkan saling memahami dan percaya antara warga dan pemerintah untuk mendapatkan administrasi yang sah (Haning & dkk, 2020). (Pamela S.Shocklev-Zalabak, 2010) menjelaskan lima dimensi kunci dari kepercayaan, yaitu kemampuan (Competence), keterbukaan (Openness), perhatian (Concern for Others),

reliabilitas (Reliability), dan identifikasi (Identification). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik antara lain transparansi, akuntabilitas, integritas, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, respon yang cepat dan tepat, serta komunikasi yang efektif (Rian, 2018)

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka memiliki kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan (Dony Prasetyo, 2020). Masyarakat yang dimaksud disini ialah peserta program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan berbagai faktor penting dalam suatu masalah (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teori persepsi Walgito (2010) digunakan untuk memahami bagaimana peserta program BLT mengindera, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi tentang penyaluran bantuan.

Definisi konsep memberikan kerangka acuan untuk mengukur variabel penelitian, sedangkan definisi operasional adalah penjelasan konkret tentang variabel yang akan diukur (Vionalita, 2019). Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang dirumuskan untuk diuji secara empiris.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix methods) yang terdiri dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan tersebut maka peneliti memilih lokasi di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan pemilihan lokasi disebabkan karena banyaknya masalah yang didapati berbasis media online yang telah peneliti kumpulkan. Berbagai masalah yang ditemukan dilokasi kajian adalah mal administrasi dimana peserta program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terpilih disebabkan karena faktor kedekatan (www.Tribunnews.com). Sehubungan dengan permasalahan di lokasi tersebut maka dari populasi (4.085) peneliti memilih hanya peserta penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 39 orang.

Sehubungan dengan kajian yang dilakukan maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (Sugiyono, 2017) :

Kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur persepsi peserta terhadap program BLT dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Wawancara semi-terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data tambahan dari peserta program BLT.

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi, seperti laporan pemerintah, data statistik, dan dokumen lain yang berkaitan dengan program BLT di desa tersebut.

Observasi yang dilakukan di lokasi untuk memahami konteks dan lingkungan sosial di mana program BLT dilaksanakan.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliabel (Sugiyono, 2017). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Ghozali, 2018). Hasil analisis penelitian untuk mendapatkan bagaimana persepsi peserta program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bagaimana kepercayaan peserta program terhadap pemerintah.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan maka didapati bahwa dari 39 responden yang telah menjawab kuesioner maka dijabarkan hasil penelitiannya sebagai berikut. Berikut

adalah jumlah penerima dari setiap dusun di Desa Cinta Damai:

Tabel 1. Jumlah Penerima BLT di Desa Cinta Damai

Nama Dusun	Jumlah Penerima BLT
Dusun I	7
Dusun II	6
Dusun III	8
Dusun IV	5
Dusun V	3

Sumber : Pemerintah Desa Cinta Damai 2022

Mayoritas responden adalah perempuan (93,1%) berusia 45-60 tahun (86,2%). Pekerjaan mereka beragam, dengan ibu rumah tangga sebagai yang paling umum (44,8%), diikuti oleh petani dan wirausaha (masing-masing 13,8%). Responden berasal dari berbagai dusun, dengan Dusun III memiliki jumlah terbanyak (27,6%). Pendidikan terakhir sebagian besar adalah SMP (41,4%) dan SMA (37,9%). Seluruh responden memiliki pendapatan per bulan antara Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000.

Pertanyaan kuesioner yang telah dijawab oleh responden adalah untuk menjawab bagaimana penilaian masyarakat terhadap program BLT dan bagaimana pula kepercayaan masyarakat terhadap publik.

Deskripsi Persepsi

Tabel 2. Hasil Kuesioner Persepsi

Pertanyaan	Frekuensi (%)				
	STS	TS	KS	S	SS
Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat Membantu pemenuhan kebutuhan keluarga	1 (3,4%)	5 (17,2%)	2 (6,9%)	13 (44,8%)	8 (27,6%)
Besaran nominal BLT atau jumlah Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima sesuai dengan apa yang dijanjikan	1 (3,4%)	5 (17,2%)	2 (6,9%)	12 (41,4%)	9 (31,0%)
Semua pihak masyarakat di perlakukan dengan sama (baik dan adil) dalam proses administrasi	1 (3,4%)	3 (10,3%)	1 (3,4%)	16 (55,2%)	8 (27,6%)
Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga	2 (6,9%)	4 (13,8%)	1 (3,4%)	15 (51,7%)	7 (24,1%)
Keterbukaan tentang data penerima BLT atau dengan data yang sebenar-benarnya	1 (3,4%)	7 (24,1%)	1 (3,4%)	10 (34,5%)	10 (34,5%)
Proses Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan sesuai prosedur	1 (3,4%)	2 (6,9%)	0 (0%)	14 (48,3%)	12 (41,4%)
Adanya kepuasan dari Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga penerima BLT	0 (0%)	2 (6,9%)	2 (6,9%)	18 (62,1%)	7 (24,1%)
Manfaat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat mengurangi kemiskinan bagi penerima BLT	2 (6,9%)	4 (13,8%)	2 (6,9%)	15 (51,7%)	6 (20,7%)
Adanya transparansi dalam proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)	2 (6,9%)	5 (17,2%)	2 (6,9%)	17 (58,6%)	3 (10,3%)

Analisis deskripsi jawaban responden tentang persepsi didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar (Ghozali 2018: 19). Tanggapan dari 39 responden terhadap variabel Persepsi. Dapat diketahui bahwa dalam pertanyaan mengenai manfaat BLT dalam pemenuhan kebutuhan menunjukkan bahwa 44,8% responden menyatakan setuju (S), bahwa BLT dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Meskipun begitu, masih ada 17,2% yang menyatakan tidak setuju (TS), yang menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat merasa bantuan ini kurang mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Sebanyak 41,4% responden menyatakan setuju (S) bahwa jumlah BLT yang mereka terima sesuai dengan janji pemerintah. Namun, 17,2% menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan adanya ketidakpuasan atau ketidaksesuaian nominal yang diterima dengan yang dijanjikan. Sebagian besar responden 55,2%, menyatakan setuju (S) bahwa proses administrasi BLT berjalan dengan adil. Namun, ada 10,3% yang menyatakan tidak setuju (TS) dan 34% yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), mengindikasikan adanya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai proses administrasi.

Mayoritas responden (51,7%) menyatakan setuju (S) bahwa BLT meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Namun, ada 13,8% responden yang menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang merasa bantuan ini belum cukup untuk membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hasil menunjukkan bahwa 34,5% responden menyatakan setuju (S) bahwa data penerima BLT transparan, namun ada 24,1% yang menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan keraguan terhadap keterbukaan data penerima.

Sebanyak 48,3% responden menyatakan setuju (S) bahwa proses penyaluran sesuai prosedur, namun ada 69% yang menyatakan tidak setuju (TS), mengindikasikan bahwa masih ada kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Mayoritas responden (62,1%) menyatakan setuju (S) bahwa mereka puas dengan bantuan BLT, tetapi ada 69% yang menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan bahwa tidak semua penerima merasa puas dengan bantuan yang diterima.

Sebanyak 51,7% responden menyatakan setuju (S) bahwa BLT membantu mengurangi kemiskinan, tetapi ada 13,8% yang menyatakan tidak setuju (TS), yang menunjukkan adanya pandangan bahwa bantuan ini belum cukup signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sebagian besar responden (58,6%) menyatakan setuju (S) bahwa proses penyaluran BLT berlangsung transparan, namun 17,2% responden merasa sebaliknya (tidak setuju - TS), yang menunjukkan ketidakpuasan terkait dengan proses transparansi penyaluran.

Deskripsi Kepercayaan Publik

Tabel 3. Hasil Kuesioner Kepercayaan

Pertanyaan	Frekuensi				
	STS	TS	KS	S	SS
Aparatur Desa yang mengelola Program BLT memiliki kompetensi yang baik tentang program BLT	0 (0%)	4 (13,8%)	3 (10,3%)	16 (55,2%)	6 (20,7%)
Semua informasi tentang Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelas diberikan oleh pemerintah Desa.	1 (3,4%)	5 (17,2%)	2 (6,9%)	16 (55,2%)	5 (17,2%)
Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk kemaslahatan bersama	1 (3,4%)	2 (6,9%)	3 (10,3%)	14 (48,3%)	9 (31%)
Masyarakat penerima program BLT telah sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran	1 (3,4%)	2 (6,9%)	4 (13,8%)	13 (44,8%)	9 (31%)
Pemerintah Desa melibatkan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat tentang penyaluran program BLT	2 (6,9%)	2 (6,9%)	2 (6,9%)	18 (62,1%)	5 (17,2%)
Aparatur Desa menjalankan program BLT secara profesional	1 (3,4%)	4 (13,8%)	3 (10,3%)	17 (58,6%)	4 (13,8%)
Pemerintah Desa memberikan informasi secara adil dan merata kepada masyarakat penerima program BLT	0 (0%)	6 (20,7%)	2 (6,9%)	14 (48,3%)	7 (24,1%)
Kesamaan waktu/serentak pada penyaluran BLT untuk masyarakat	2 (6,9%)	2 (6,9%)	1 (3,4%)	20 (69%)	4 (13,8%)
Tidak ada diskriminasi dalam penetapan penerima data Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1 (3,4%)	3 (10,3%)	2 (6,9%)	17 (58,6%)	6 (20,7%)
Pengelolaan program BLT yang dilakukan aparatur Desa sesuai dengan manfaat yang diperoleh masyarakat	0 (0%)	4 (13,8%)	2 (6,9%)	15 (51,7%)	8 (27,6%)

Hasil analisis deskripsi kepercayaan pada pertanyaan tentang aparatur desa memiliki kompetensi terhadap program BLT, sebanyak 55,2% responden menyatakan setuju (S) menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola BLT, namun ada 13,8% yang menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih meragukan kompetensi aparatur desa. Berdasarkan hal ini diambil dari pendapat McClelland (1987) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang berkaitan langsung dengan kinerja yang efektif. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi yang memengaruhi bagaimana individu menjalankan tugasnya dengan baik.

Hasil menunjukkan bahwa 55,2% responden setuju (S) bahwa informasi BLT disampaikan dengan jelas oleh pemerintah desa. Namun, 17,2% menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Sebanyak 48,3% responden menyatakan setuju (S) bahwa keputusan diambil melalui musyawarah, tetapi ada 10,3% yang merasa tidak demikian (tidak setuju-TS), mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat meragukan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

Mayoritas responden (44,8%) menyatakan setuju (S) bahwa penerima BLT sudah

sesuai dengan kriteria, tetapi 138% menyatakan tidak setuju (TS), yang menunjukkan bahwa masih ada pandangan bahwa penerima belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebanyak 62,1% responden menyatakan setuju (S) bahwa masyarakat dilibatkan dalam penyaluran BLT, tetapi ada 69% yang tidak setuju (TS), menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Mayoritas responden (58,6%) menyatakan setuju (S) bahwa aparatur desa menjalankan BLT secara profesional, namun ada 13,8% yang menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat meragukan profesionalisme aparatur desa. Sebanyak 48,3% responden menyatakan setuju (S) bahwa informasi diberikan secara adil, tetapi 20,7% menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan adanya persepsi bahwa informasi belum merata.

Sebanyak 58,6% responden menyatakan setuju (S) bahwa penyaluran dilakukan secara serentak, tetapi 13,8% menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah terkait keseragaman waktu penyaluran. Sebanyak 58,6% responden setuju (S) bahwa tidak ada diskriminasi, tetapi 10,3% menyatakan tidak setuju (TS), menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait keadilan dalam penetapan penerima. Terakhir Sebanyak 51,7% responden menyatakan setuju (S) bahwa pengelolaan BLT sesuai dengan manfaat yang diterima masyarakat, tetapi 13,8% menyatakan tidak setuju (TS), yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa pengelolaan belum sepenuhnya efektif.

Persepsi Program BLT terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan suatu penggambaran dari persepsi individu atau masyarakat dalam sistem pemerintahan. Persepsi diartikan sebagai proses di mana individu mengorganisasikan dan menganalisis reaksi sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya (Sutirisman, 2019). Dari hasil perbandingan simpulan wawancara yang saya lakukan kepada warga desa cinta damai yang tidak mendapatkan dana BLT saya rangkum menjadi 2 dikarenakan hampir semua jawaban mereka sama dan tidak beda jauh.

“Saya juga tidak tahu kapan orang desa mendata masyarakat yang dianggap miskin sehingga berhak mendapatkan dana BLT. Saya juga baru tau dari adek orang orang yang mendapat dana bantuan tersebut. Mungkin bisa saja karena memang dekat dengan kepala dusun makanya mereka dapat dana BLT atau memang saya nya yang tidak mendengar ketika adanya pendataan” (Wawancara dengan Bapak Sitinjak 9 Juli 2024).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sihaan yakni:

“Memang untuk penerima BLT tidak ada proses nya atau panduannya langsung disini. Soalnya katanya kepala dusun nya yang merekomendasikan ke kepala desa. Nah saya tidak tahu pula orang seperti apa yang direkomendasikan kepala dusun itu, apakah emang pantas atau tidak. Saya juga baru tahu nama nama itu dari kamu, dan dari yang saya tahu mereka memang rata rata punya sakit dan keterbatasan”. (Wawancara dengan Ibu Sihaan, 9 Juli 2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diuraikan bahwa persepsi positif atau persepsi baik hanya di berikan oleh orang yang menerima manfaat dana BLT sedangkan yang tidak menerima mereka akan berpersepsi negative atau buruk. Dan juga dapat disimpulkan bahwa belum adanya transparansi data di desa Cinta Damai, selaras dengan teori transparansi menurut Etzioni mengasumsikan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi akan memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan-pilihan, memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menyediakan produk yang diinginkan dan sebaliknya melemahkan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Susanna Kim Ripken (dalam Etzioni, 2010) bahwa setiap individu dapat mengatur urusan ekonomi mereka sendiri dan dengan diberikannya informasi yang memadai, maka individu dapat membuat penilaian sendiri terhadap setiap resiko dan manfaat dari transaksi ekonomi.

Persepsi merupakan upaya seseorang untuk memberikan reaksi terhadap suatu keadaan yang sedang terjadi di sekitarnya berdasarkan pada hal-hal yang dialami dan dirasakan oleh dirinya (Himawati, 2021). Persepsi ini muncul akibat dari tindakan pemerintah. Persepsi publik bersifat beragam yang bergantung pada cara publik menyerap kebijakan dan tindakan pemerintah terhadap suatu hal yang kemudian tanggapi dengan bentuk sikap dan perilaku publik terhadap kebijakan pemerintah untuk menerima atau menolak.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah program BLT merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dianggap kurang mampu. Dalam pelaksanaannya dan kenyataannya program BLT banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Mulai dari anggapan program ini salah sasaran, program BLT membuat masyarakat ketergantungan hingga program BLT yang salah dalam pelaksanaannya, namun program ini juga dinilai berhasil oleh beberapa kalangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi program BLT terhadap kepercayaan publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di Desa Cinta Damai Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis persepsi program BLT terhadap kepercayaan publik didapatkan hasil bahwa persepsi program BLT terhadap kepercayaan publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan besar yakni 21%. Andhika (2017) mengungkapkan bahwa kepercayaan publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan kepercayaan publik dipengaruhi oleh kebijakan. Temuan ini didukung oleh penelitian Febrianti & Maulana (2013) bahwa terdapat pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepercayaan publik pada kepolisian. Pada pendekatan psikologi, kepercayaan publik dapat dilihat melalui evaluasi masyarakat tentang nilai atau karakter dasar yang dimiliki oleh pemerintah (Dwiyanto, 2019).

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan ada hubungan baik antara persepsi program BLT terhadap kepercayaan publik, artinya apabila semakin baik persepsi program BLT bagi masyarakat maka semakin baik pula kepercayaan publik di Desa Cintai Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Ketika interaksi masyarakat dengan pemerintah semakin dekat maka masyarakat akan merasakan kedekatan emosional dengan pemerintah, hal ini ditandai dengan sikap positif masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, semakin jauh rasa emosional masyarakat terhadap pemerintah maka akan melahirkan sikap yang negatif terhadap pemerintah.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi pula oleh seberapa baiknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dwiyanto (2019) mengungkapkan bahwa apabila pemerintah mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan tindakan atau perilaku yang baik kepada pemerintah.

Proses persepsi berkaitan dengan bagaimana persepsi lahir dan mempengaruhi sikap serta perilaku individu. Hal ini menunjukkan bahwa proses persepsi menggambarkan bagaimana objek, peristiwa, dan penerimaan serta bagaimana persepsi tersebut diseleksi dan diinterpretasikan sehingga memperoleh hasil tertentu bagi individu yang menerima atau menangkap rangsangan yang ada (Dzulfahmi, 2021).

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Cinta Damai memberikan dampak baik terhadap kepercayaan publik, terutama bagi penerima manfaat. Persepsi masyarakat penerima BLT terhadap program ini cenderung positif, dengan mayoritas responden menyatakan bahwa bantuan ini membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan

kesejahteraan. Namun, ada beberapa tantangan yang teridentifikasi, terutama di kalangan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Persepsi negatif timbul dari kurangnya transparansi dan keadilan dalam proses pendataan dan penyaluran BLT, yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak terlibat atau diabaikan dalam penentuan penerima bantuan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara persepsi masyarakat terhadap BLT dan kepercayaan publik cukup signifikan, di mana 21% dari variabilitas kepercayaan publik dipengaruhi oleh persepsi terhadap program BLT. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, semakin baik persepsi masyarakat terhadap program ini, semakin besar pula tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa.

Daftar Pustaka

A Anshori, A. M. (2021). *IsuIsu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan*. Umsu Press.

Abdullah Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik. Jurnal Publik*, 11(1).

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Indonesia: Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.

Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13-38.

Dony Prasetyo, I. (2020). *Sosiologi: Mengenal Masyarakat, Struktur Sosial, dan Proses Sosial*. Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dwiyanto, A. (2019). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fidayanti B Hakima, P. E. (n.d.). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Values. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haning, M., & dkk. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 15-22.

Himawati, U. (2021, Februari). Analisis persepsi masyarakat terhadap manfaat bantuan langsung tunai dana desa di desa munengwarangan kecamatan pakis kabupaten magelang. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Ika Agustina, A. H. (2021, Desember). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(2).

Midgley, J. (2000). *Social Welfare in Global Context*. Sage Publications.

Mohammad Yusri, S. S. (2021). *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik: Paradigma, Konsep, Prinsip, dan Instrumen*. Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pamela S. Shockley-Zalabak, d. (2010). *Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge, Sensitivity, Skill, Values*. Boston: Pearson Education.

Rian, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 100-112.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Indonesia, Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutirisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Indonesia: Guepedia.

Tioma Roniuli Hariandja, N. T. (2020). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(2).

Vionalita. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 1-10.

Walgitto, B. (2015). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Widodo, J. (2001). *Kebijakan Publik: Proses, Aktor, dan Model-model*. Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik*. 30.